

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, jakarta: PT. Rajawali Pers, 2004
- Aprilia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, bandung :Alfabeta,2014h.164
- Bambang sunggono, *Metode Penilitian Hukum*, jakarta : Rajawali Pres, 2009
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010
- Chabib sholeh, *Dialektika Pembangunan Pemberdayaan*, Bandung : Sinar Grafika, 2014
- Ernan Rustiadi, *Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011
- Hajar.M.*Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA 2011
- Hardiyansah, *Kualitas Pelayanan Publik*, Yogyakarta:Gava Media, 2011
- Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga*, Jakarta : Konstitusi Press, 2005
- Marsono , *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta : In Media, 2007.
- Muhmidayeli, *Teori-Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Pekanbaru:Pascasarjana Uin, 2007
- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 16 *Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat*
- Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (1) *tentang Kecamatan*
- Peraturan Walikota Dumai No.43 Tahun 2008*tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan*
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006

Sadu Wasisto, *Kapita Selekta Management Pemerintah Daerah*, Bandung : Fokus Media, 2003

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012

Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009

Suparlan Al Hakim, *Pengantar Studi Masyarakat Indonesia*, Malang : Madani,2015

Sutoro Eko, *Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jakarta : PT. Aditya Bakti, 2002

Totok Mardikanto & Poewoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta, 2013

Undang-Undang No.23 Tahun 2014*tentang Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 *tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*